

Keterpurukan Penonton Bioskop di Kota Semarang, 1979-1996

Luluk Maknunah,^{1*} Bambang Rakhmanto,¹ Ufi Saraswati¹

¹Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: lumafarun12@students.unnes.ac.id, bambang.rakhmanto@mail.unnes.ac.id, ufiratri@mail.unnes.ac.id

*Korespondensi



Received: 11-07-2025, Revised: 12-07-2026, Accepted: 14-07-2026, Published: 30-07-2026

Abstrak

Studi ini meneliti penurunan jumlah penonton bioskop di Kota Semarang antara tahun 1979 dan 1996 dalam kaitannya dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat perkotaan. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi masyarakat Semarang selama periode tersebut dan untuk menganalisis penurunan jumlah penonton bioskop dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya. Studi ini menggunakan metode historis, termasuk heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data meliputi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, arsip surat kabar kontemporer, dan wawancara dengan informan yang terlibat atau mengalami langsung industri perfilman di Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah bioskop di Semarang terus meningkat dari akhir tahun 1970-an hingga tahun 1980-an, jumlah penonton bioskop cenderung menurun. Pada tahun 1980-an, rata-rata jumlah penonton bioskop mencapai sekitar empat juta per tahun, tetapi pada tahun 1990-an, angka ini turun drastis menjadi sekitar empat ratus ribu per tahun. Berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi audio-visual, munculnya televisi dan VCD, peredaran VCD bajakan yang tinggi, harga tiket yang tinggi, dan fasilitas yang tidak memadai di bioskop tradisional, memengaruhi penurunan ini. Selain itu, dominasi bioskop modern dalam distribusi film impor dan menurunnya daya tarik film nasional juga melemahkan posisi bioskop lokal. Situasi ini semakin diperparah oleh tingginya pajak hiburan dan krisis moneter 1997–1998, yang mengurangi daya beli masyarakat. Akibatnya, beberapa bioskop tradisional di Semarang terpaksa tutup karena kerugian yang terus berlanjut. Penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan bioskop di Semarang merupakan akibat dari perubahan teknologi, ekonomi, dan pola konsumsi hiburan publik, yang telah mengubah peran bioskop sebagai ruang hiburan publik.

Kata Kunci: bioskop; hiburan publik; penonton; Semarang; teknologi

Abstract

This study examines the decline in cinema attendance in Semarang City between 1979 and 1996 in relation to social, economic, and cultural changes in urban society. The study aims to describe the conditions of Semarang society during this period and to analyze the decline in cinema attendance and the factors contributing to it. The study employed historical methods, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data sources included statistics from the Central Java Statistics Agency (BPS), contemporary newspaper archives, and interviews with informants who were involved in or experienced the cinema industry firsthand in Semarang. The results show that although the number of cinemas in Semarang continued to increase from the late 1970s to the 1980s, the number of cinemagoers tended to decline. In the 1980s, the average number of cinemagoers reached

around four million per year, but in the 1990s, this number dropped drastically to around four hundred thousand per year. Various factors, such as advances in audio-visual technology, the rise of television and VCDs, the high circulation of pirated VCDs, high ticket prices, and inadequate facilities at traditional cinemas, influenced this decline. Furthermore, the dominance of modern cineplexes in the distribution of imported films and the declining appeal of national films also weakened the position of local cinemas. This situation was further exacerbated by high entertainment taxes and the 1997–1998 monetary crisis, which reduced public purchasing power. As a result, several traditional cinemas in Semarang were forced to close due to continued losses. This research shows that the decline of cinemas in Semarang is the result of changes in technology, the economy, and public entertainment consumption patterns, which have transformed cinemas' role as public entertainment spaces.

Keywords: Audience; Cinema; Public Entertainment; Semarang; Technology



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Masyarakat Kota Semarang telah mengenal bioskop sejak tahun 1905. Namun, film yang diputar saat itu masih berupa gambar hidup tanpa suara. Untuk memberi kesan yang lebih nyata dan menarik, suara ditambahkan secara manual selama pemutaran film (Ardan, 1992). Pada tahun 1936 terdapat 4 bioskop yaitu *City Theater* (Liem Khoen Hwan), *Djagalan Bioscoop* (A. E. Lazare), *Oost Java Bioscoop* (W. Apple), *Royal Theater* (Liem Khoen Goan). Pada tahun 1937 Semarang tercatat memiliki 9 bioskop namun saat masa pendudukan Jepang mengalami penurunan menjadi 7 bioskop karena terpaksa sering memutar ulang film. Pada masa kependudukan Jepang ini bioskop dibuat sebagai tempat propaganda Jepang dengan ditampilkannya visi dan misi Jepang untuk mempengaruhi masyarakat bahwa Jepang adalah penyelamat Indonesia. Pada masa ini masyarakat kelas bawah diberi jatah kursi hanya 50 persen untuk tetap bisa menonton di bioskop (Tjasmadi, 2008).

Setelah kemerdekaan Indonesia bioskop di Semarang mulai mengalami kemajuan karena mulai diperbaiki fasilitasnya dan mulai memutar film-film yang lebih baik, para penonton pun mulai berdatangan dan menjadikan bioskop sebagai tempat alternatif melepas penat untuk mencari hiburan. Bioskop di kota Semarang semakin eksis di tahun 1970-an dengan banyaknya bioskop lokal yang dibangun. Animo masyarakat pun meningkat pada tahun 1970-1980 karena belum banyak hiburan lain yang dapat ditawarkan terhadap masyarakat kota Semarang. Namun kejayaannya tidak berangsur lama sebab di tahun 1990-an banyak bioskop di Semarang yang ditutup (Jauhari, 1992).

Bioskop bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Semarang. Hampir setiap hari dapat dilihat di media massa ataupun media sosial mengenai iklan pemutaran film yang akan dirilis di bioskop. Di kota-kota besar sendiri, bioskop masih menjadi tempat favorit para remaja dan dewasa untuk menonton film, terutama saat perilisan film yang bergenre horor dan komedi. Hal ini karena bioskop di kota-kota tersebut masih mampu eksis di tengah persaingan meningkatnya perkembangan teknologi dimana bioskop tidak lagi menjadi tempat untuk menonton film. Hal ini dimungkinkan karena bioskop dapat menawarkan kenyamanan berupa pelayanan

dan sarana prasarana yang memadai sehingga menonton film tetap lebih mengasyikkan di bioskop bersama teman-teman daripada harus menonton di rumah dengan sarana yang terbatas. Terlebih euforia menonton film di bioskop berbeda dengan menonton film di laptop ataupun gadget, daripada harus menonton di rumah dengan sarana yang terbatas (Nuqul, 2005).

Sebagai salah satu tempat hiburan, dengan ditutupnya bioskop lokal di hampir seluruh kota di Indonesia termasuk Semarang membuat hilangnya ruang publik bagi masyarakat untuk bertemu dan berkomunikasi. Pasalnya bioskop lokal adalah bioskop kelas bawah yang biasanya berada di kota-kota kecil dengan penonton yang memiliki status menengah ke bawah. Dengan ditutupnya bioskop lokal ini membuat masyarakat kelas bawah kehilangan sumber hiburannya karena sulit mengakses bioskop di kota besar ataupun bioskop kelas a yang mana harganya jauh lebih mahal (Arief, 2019). Menurunnya penonton bioskop di kota Semarang menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam apalagi dalam rentang waktu 1990-an banyak bioskop lokal di Indonesia yang tutup dan bangunannya banyak yang mangkrak. Pada kenyataannya memang di tahun 1990-an Indonesia mengalami krisis produksi film dan banyaknya persaingan media hiburan lainnya yang dapat menggeser eksistensi bioskop sebagai media hiburan masyarakat kota Semarang.

Menurut berbagai sumber penelitian, pembahasan mengenai sinema sudah banyak dilakukan. Salah satu penelitiannya, Fitriani (2017), fokus utamanya pada perkembangan institusi sinema dan keberadaannya sebagai sarana hiburan masyarakat. Arief (2019) lainnya menjelaskan matinya Bioskop Permata di Yogyakarta dan dampaknya terhadap masyarakat setempat, khususnya hilangnya ruang hiburan bagi masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini merupakan studi kasus pada bioskop tunggal. Lebih lanjut, penelitian Aditama (2022) mengkaji hubungan sinema dengan kehidupan sosial masyarakat Palu dalam kurun waktu yang lama, serta peran sinema sebagai sarana hiburan dan interaksi sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya pada penonton bioskop, bukan pada sejarah perkembangan sinema atau studi kasus pada satu bioskop. Analisis ini menggunakan data kuantitatif mengenai jumlah penonton dan bioskop dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah pada tahun 1979–1997 untuk menunjukkan pola historis penurunan. Analisis multifaktorial menghubungkan penurunan jumlah penonton dengan perkembangan televisi, VCD, pembajakan, bioskop, kualitas film nasional, fasilitas bioskop, harga tiket, dan krisis moneter. Belum ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik membahas penurunan jumlah penonton bioskop di Semarang dalam jangka waktu tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kota Semarang pada periode 1979–1996 serta menganalisis penurunan jumlah penonton bioskop dan berbagai faktor yang menyebabkan menurunnya jumlah bioskop di kota tersebut. Penelitian ini penting karena dapat mengisi kekosongan kajian sejarah lokal mengenai kehadiran bioskop di Semarang, sebuah topik yang belum banyak dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada sejarah perkembangan sinema atau studi kasus bioskop tertentu, penelitian ini menyoroti perubahan perilaku menonton masyarakat dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya bioskop sebagai ruang hiburan publik. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai dampak perkembangan

teknologi, seperti televisi dan VCD, terhadap perubahan pola konsumsi hiburan masyarakat perkotaan. Kajian ini juga penting untuk menjelaskan hubungan antara transformasi industri film, kondisi perekonomian, kebijakan perpajakan, dan menurunnya daya beli dengan kelangsungan bioskop tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap historiografi perfilman Indonesia, namun juga memberikan gambaran mengenai perubahan sosial dan budaya di Semarang serta hilangnya ruang publik yang dulunya berfungsi sebagai sarana hiburan dan interaksi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian sejarah. Ada empat langkah dalam prosedur penelitian sejarah yaitu *heuristik*, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah. Sumber utama dari penulisan ini adalah data penonton bioskop tahun 1979-1996 dari BPS Jawa Tengah, surat kabar sezaman dari depo arsip Suara Merdeka dan Sidak, lalu wawancara dengan enam informan. Data lainnya untuk menunjang penulisan ini menggunakan beberapa buku dan jurnal seperti buku Kota Semarang Dalem Kenangan (Tio, 2002). Buku ini banyak membahas mengenai kota Semarang pada masa Hindia Belanda. Tulisan ini sangat membantu untuk menggambarkan keadaan kota Semarang di era kolonial, terlebih pada jalan-jalan di kota Semarang dahulu yang sekarang sudah berganti nama. pada buku (Jauhari, 1992), buku ini membahas mengenai eksistensi bioskop di Indonesia selama 90 tahun dari tahun 1900 sampai 1991. Dalam karya ini dituliskan bahwa kondisi pajak tontonan film di Indonesia tertinggi di dunia, kondisi ini membuat puluhan pemilik bioskop frustrasi dan mengalihkan usaha mereka ke bidang lain atau gulung tikar.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Masyarakat Kota Semarang Tahun 1979-1996

Kota Semarang pada tahun 1970-an, apabila ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya merupakan pembahasan yang kompleks. Wilayahnya juga semakin luas dengan adanya pemekaran dari 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan (Suwitri, 2010). Kota Semarang merupakan kota perdagangan yang menarik masyarakat dari kota disekitarnya untuk melakukan urbanisasi. Kondisi ini membuat masyarakat kota Semarang terdiri dari berbagai suku dan ras yang berpengaruh terhadap aktivitas sosial dan ekonomi (Suwitri, 2010). Jumlah masyarakat kota Semarang pada tahun 1971 mencapai 712.549, lalu meningkat menjadi 967.029 pada tahun 1978. Semakin bertambah masyarakat kota Semarang hingga pada tahun 1997 mencapai 1.367.949 jiwa. Urbanisasi menjadi faktor utama meningkatnya jumlah penduduk kota Semarang untuk mencari pekerjaan. Meningkatnya jumlah penduduk ini memicu pergeseran pola hunian.

Kota Semarang dikenal sebagai kota dagang, ada berbagai aktivitas ekonomi dari pedagang kaki lima hingga pusat perbelanjaan modern. Dalam hal bisnis terdapat berbagai pabrik, perbankan, perhotelan, dan lainnya. Sudah ada puluhan pabrik di Semarang pada tahun 1970, contohnya ada berbagai merk rokok yang diproduksi di kota Semarang seperti Poo Hien, Perahu Layar, Pompa, Bengawan Solo, Tuton, Pak Tani, Gentong Gotri, dan Sumber Girang. Ada juga perusahaan jamu seperti Djamu Djago, Sido Muncul, Air Mancur, Borobudur dan Nyonya Meneer yang

masih eksis hingga sekarang. Sejak dahulu jalan pemuda yang dulunya bernama jalan Bojong, sudah ramai dengan adanya pertokoan penjualan mobil dan bengkel (Tio, 2002).

Majunya semarang membuat kotanya banyak memiliki fasilitas hiburan seperti klub, bioskop, dan pasar yang menjadi bagian keseharian masyarakat untuk mencari hiburan. Adanya hiburan ini menunjukkan adanya interaksi antar etnis. (Lombard, 1996). Masyarakat kota Semarang sangat menyukai kesenian dan yang paling terkenal adalah Gambang Semarang. Gambang Semarang sendiri diadaptasi dari gambang kromong dari Batavia. Hingga tahun 1960, kesenian ini mulai dilupakan namun berhasil menjadi favorit masyarakat kota Semarang setelah di variasikan sedemikian rupa dan pada akhirnya tetap disukai oleh masyarakat Semarang.

Penonton Bioskop di Kota Semarang Tahun 1979-1997

Semarang sudah dapat merasakan menonton bioskop pada tahun 1905 dengan bukti gambar idoep yang diisi dengan suara manual menggunakan suara orang saat film diputar mendapat pujian di kota Semarang saat pertama ditayangkan (Ardan, 1992). Pada saat itu bioskop belum menetap, tempatnya masih berganti-ganti namun pengusaha bioskop sengaja menaikkan tarif harga masuk sebesar 50 sen, agar pribumi tidak dapat menonton bioskop (Pos Sumatera, 8 Januari 1910).

Tabel 1. Bioskop dan Jumlah Penonton di Jawa Tengah Tahun 1974- 1978

No	Tahun	Jumlah Bioskop	Jumlah Penonton
1	1974	76	8.807.991
2	1975	91	9.645.212
3	1976	96	12.869.085
4	1977	101	13.518.579
5	1978	107	13.825.043

Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 1979

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun jumlah bioskop semakin naik di setiap tahunnya, begitu pula dengan jumlah penontonnya. Bisa dibilang tahun 1970-an adalah masa keemasan bagi bisnis layar perak, hal ini karena jumlahnya yang semakin bertambah setiap tahunnya. Jumlah bioskop yang kian naik ini nyatanya tidak merata, layar perak hanya ada di kota-kota besar saja. Banyak kota-kota kecil yang belum memiliki bioskop. Masyarakat yang tinggal di pedesaan juga butuh hiburan. Dari permasalahan tersebut, pengusaha bioskop dan produser pun memiliki ide untuk membawa bioskop keliling ke berbagai desa dengan peralatan yang sederhana seperti proyektor film 16 mm, sejumlah kru, dan diesel listrik. Biaya menontonnya pun cukup murah mulai dari Rp 200- Rp 300 saja (Jauhari, 1992, p. 124). Bisnis bioskop keliling ini semakin banyak diminati, bahkan pada tahun 1978 didirikan organisasi PERBIKI (Persatuan Bioskop Keliling Indonesia).

Tabel 2. Bioskop dan Jumlah Penonton di Semarang Tahun 1979, 1980, 1983-1989

No	Tahun	Jumlah Bioskop	Jumlah Penonton
1	1974	76	8.807.991
2	1975	91	9.645.212
3	1976	96	12.869.085
4	1977	101	13.518.579
5	1978	107	13.825.043

Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 1979, 1980, 1983-1989

Dari tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah bioskop di kota Semarang pada tahun 1979-1989 mengalami perkembangan dalam segi jumlah, namun mengalami penurunan setiap tahunnya, mengalami kenaikan drastis pada tahun 1987. Namun tahun setelahnya juga mengalami penurunan. Selama akhir tahun 70-an sampai 80-an yang dikatakan bioskop mengalami masa kejayaan karena banyak dibangun gedung bioskop nyatanya tidak berlaku untuk jumlah penontonya yang mengalami penurunan, walaupun penurunannya tidak terlalu drastis tetapi dapat dikatakan stabil.

Akhir Tahun 80-an memang industri perbioskopian sudah menunjukkan kelesuhannya, tahun 1988 banyak pengusaha bioskop yang mengeluh bisnisnya mengalami penurunan sebesar 30%- 40% dibanding tahun 1987. Penurunan jumlah penonton ini karena kondisi ekonomi yang sulit dan banyaknya film yang dijual secara bebas, khususnya film luar negeri yang belum tayang di bioskop (Suara Merdeka, 1984) Sepinya minat bioskop yang terjadi pada akhir tahun 80 hingga sepanjang tahun 90-an karena bioskop bersaing dengan penayangan film gratis di televisi dan banyaknya pembajakan VCD dan DVD (Panuju, 2021).

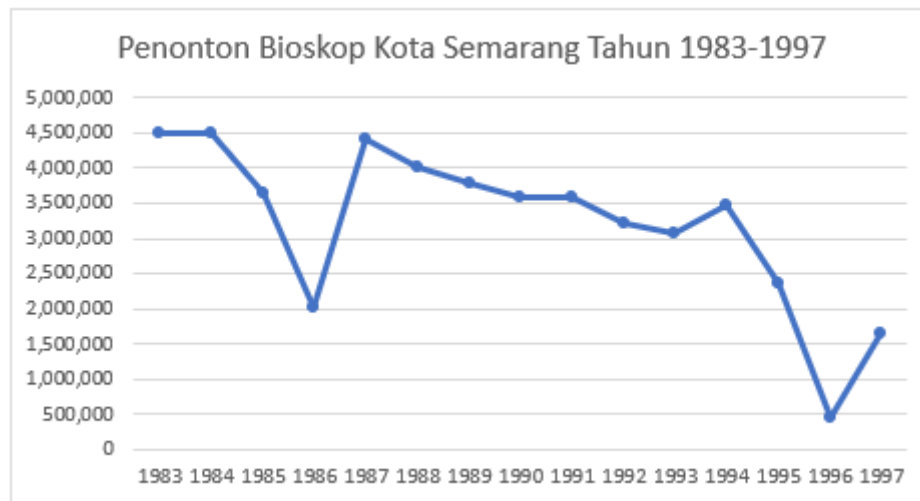
Pada tahun 1990, dunia perbioskopian di Indonesia bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Pajak tontonan yang tinggi masih menjadi persoalan yang dikeluhkan para pengusaha bioskop di Indonesia. Pajak tontonan di setiap kota pun berbeda-beda seperti di Semarang dan DIY 30%, kota-kota di Jawa Barat sebesar 25%, dan Bali 23%. Pajak tontonan film di Indonesia memang termasuk yang paling tinggi di dunia. Pengusaha bioskop hanya mendapatkan 17,5 % dari hasil kotor penjualan karcis, karena harus terpotong pembayaran listrik, gaji pegawai, pajak, dan lainnya. Minimnya penghasilan kotor inilah yang membuat puluhan bioskop gulung tikar dan mengalihkan gedungnya sebagai usaha baru yang jauh menjanjikan (Biran, 2009).

Tabel 3. Jumlah Bioskop di Kota Semarang dan Jumlah Penontonnya Tahun 1990-1997

No	Tahun	Jumlah Bioskop	Jumlah Penonton
1	1990	-	3.595.840
2	1991	-	3.588.906
3	1992	-	3.203.410
4	1993	36	3.067.401
5	1994	40	3.484.085
6	1995	36	2.358.533
7	1996	7	458.098
8	1997	9	1.645.972

Sumber: BPS 1990,1991,1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 1990 penonton bioskop mengalami penurunan, begitupun pada tiga tahun selanjutnya. Namun di tahun 1994 mengalami sedikit peningkatan, meskipun dua tahun selanjutnya penurunan penonton sangat tajam. Di tahun 1997 mengalami kenaikan empat kali lipat dari tahun sebelumnya tetapi tidak sebanyak pada tahun kejayaannya.



Gambar 1. Penonton Bioskop Kota Semarang Tahun 1983-1997
Sumber: BPS 1983-1997

Dari grafik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 1983 penonton bioskop mencapai empat juta penonton, meskipun dua tahun setelahnya mengalami penurunan seperempat dari jumlah rata-ratanya. Menurun lagi di tahun 1986 menjadi setengah penonton. Setahun setelahnya kembali di angka empat juta. Tahun-tahun berikutnya semakin menurun. Jika dibandingkan dengan angka penonton tahun 80-an yang rata-rata mencapai 4 juta, di akhir tahun 90-an malah hanya 400 penonton saja. Jumlah penonton ini menunjukkan penurunan drastis mencapai 89% dari masa kejayaannya. Meskipun penurunan penonton bioskop ini dibarengi dengan berkurangnya jumlah bioskop akibat maraknya VCD dan televisi.

Tahun 1990 Indonesia tercatat memiliki 2.600 total bioskop, lalu menurun sangat drastis di tahun 2002 yang hanya menyisakan 264 buah saja. Memasuki tahun 90-an memang minat penonton menurun akibat adanya teknologi baru, puncaknya saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998 banyak bioskop yang gulung tikar. Bioskop yang masih tersisa hanya beberapa saja, itupun hanya yang kelas elite yang biasanya menyatu dengan mall dan bekerjasama dengan jaringan cineplex. Masyarakat kota Semarang enggan membuang-uangnya untuk sesuatu yang dirasa kurang penting seperti hiburan menonton bioskop misalnya, pasalnya semua serba mahal saat itu (Wawancara dengan Yayuk, 12 April 2025). Pertumbuhan ekonomi mencapai -13,1 % dan angka inflasi juga naik. Jumlah pengangguran naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya hingga menyebabkan kerusakan (Sunardi et al., 2024). Tidak heran apabila di tahun 1997-1998 banyak bioskop yang mati.

Setelah tahun 2002, bioskop di Indonesia mengalami perkembangan dengan tahun 2007 tercatat ada 483 bioskop di tanah air (Panuju, 2021). Awal tahun 2000 penonton bioskop mengalami kenaikan daripada tahun 90-an, hal ini karena tahun

2000-an merupakan kebangkitan film nasional. Petualangan Sherina contohnya yang mendapat 350.000 penonton, yang mana saat itu jumlah yang cukup besar untuk ukuran penonton bioskop di masanya (Studio Antelope) Dari kebangkitan film ini, banyak dibangun bioskop-bioskop baru yang menyatu dengan pusat perbelanjaan seperti Paragon, E Plaza dan DP Mall.

Pengaruh Naik Turunnya Penonton Bioskop

Naik turunnya penonton bioskop di kota Semarang ini disebabkan oleh filmnya, apabila film yang tayang dinilai bagus dan menarik oleh masyarakat maka penontonnya banyak, begitupula sebaliknya. Pemeran dalam film juga menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik penonton. Pasalnya banyak masyarakat yang tidak tahu judul film yang sedang tayang di bioskop, namun mengenal para aktor ataupun artisnya yang punya peran iconic pada film-film sebelumnya seperti Barry Prima yang terkenal lewat filmnya Komando Samber Nyawa, Primitif, dan Jaka Sembung, dan dikenal sebagai aktor spesialis laga bahkan dijuluki sebagai “Raja Film Laga Indonesia”, lalu Amitabh Bachchan yang menjadi pahlawan aksi untuk menyelamatkan kekasihnya (Wawancara Dengan Wahyono Gunung, 08 Maret 2025). Masyarakat kota Semarang lebih suka film bergenre komedi seperti seri film Warkop DKI, film horor yang dibintangi oleh Suzanna, dan film bergenre laga kolosal. Apabila film-film dengan genre tersebut tayang di bioskop, karcisnya selalu cepat habis dan penonton membludak. (Wawancara dengan Tarcisius, 12 April 2025).

Banyak sedikitnya penonton pada tahun 1990-an juga dipengaruhi oleh upaya bioskop untuk menarik para konsumennya. Biasanya banyak bioskop-bioskop di kota Semarang yang menggunakan promo pada akhir pekan, promo ini biasa disebut midnight show. Ada juga bioskop yang memberikan harga murah atau yang disebut extra show ketika hari senin seperti bioskop Gajahmada dan Plaza yang mematok harga Rp 1000 sedangkan untuk hari lainnya harga kembali normal. Terkadang pihak bioskop juga bekerjasama dengan bank tertentu untuk memberikan bonus bagi nasabahnya. Promo nonton bioskop juga diberikan pada orang-orang penting seperti lurah desa tertentu, anggota DPR, dan anggota TNI. Selain itu ada beberapa bioskop yang menggunakan promo beli satu gratis satu, ada juga yang gratis makan (Wawancara dengan Tarcisius, 12 April 2025).

Faktor Penyebab Menurunnya Penonton Bioskop di Kota Semarang

Ada beberapa faktor yang membuat penonton bioskop di kota Semarang menurun pada tahun 1990 kebawah. Faktor yang paling utama adalah adanya teknologi terbaru yang lebih mudah didapatkan sehingga lebih menghemat waktu. Berikut faktor-faktor yang membuat penonton bioskop menurun di Kota Semarang.

1. Pesatnya Kemajuan Teknologi

Teknologi audio video semakin maju pada tahun 80-an, namun industri film di Indonesia belum mampu mengimbangnya lantaran dana yang dikeluarkan pun juga cukup mahal. Jika film Amerika sudah menggunakan teknologi tata surya dolby stereo dan filmnya berwarna saat itu, sedangkan film Indonesia menggunakan tata surya yang mono dan pasca produksinya juga dilakukan di luar negeri karena

perusahaan laboratorium Indonesia belum memadai. Kurangnya kualitas dari produksi film Indonesia ini membuat penonton Indonesia lebih menyukai film Amerika (Kurnia et al., 2004). Sementara pada tahun 1987 muncul teknologi baru untuk menyimpan video bernama VCD, pada awalnya alat ini marak karena banyaknya antusias masyarakat ekonomi menengah kebawah yang tidak sabar menunggu film Amerika turun layar dari bioskop kelas pertama ke bioskop tingkat yang lebih rendah. Dari alat VCD ini muncul banyaknya VCD bajakan yang harganya jauh lebih murah dan dapat di beli oleh kalangan bawah.

Pada tahun 1999, Harian Kompas membuat laporan mengenai VCD. Saat itu diperkirakan ada 5000 judul VCD film, 4000 judul bajakan 1000 judulnya resmi. Harga VCD resmi itu Rp 50.000, sedangkan bajakannya Rp 12.500. Apabila dikalikan keuntungan VCD resmi mencapai Rp 150 miliar, sedangkan yang bajakannya Rp 500 miliar. Harga-harga ini bisa menurun akibat persaingan harga yang semakin ketat, puncak termurahnya harga VCD resmi mencapai Rp 15.000 sedangkan yang bajakan seharga Rp 5000 (Kristanto, 2005). Larisnya bisnis jual beli alat ini membuat peluang bisnis-bisnis baru seperti penyewaan VCD dan bioskop kecil di rumah-rumah yang tentu harganya berlipat-lipat lebih murah daripada menonton di bioskop (Wawancara Dengan Tarcisius, 12 April 2025). Harga dari penyewaan kaset video ini Rp 1500 per hari, ada juga yang bulanan. Pendapatan dari bisnis penyewaan VCD ini bahkan mencapai 5 miliar perbulannya (Nugroho & Herlina, 2015).

2. Harga Karcis yang Mahal

Dengan adanya hiburan lain yang jauh lebih murah membuat penonton enggan menonton bioskop kembali, pasalnya pada tahun 90-an harga karcis bioskop berkisar Rp. 15000 untuk nonton bioskop elite yang menyatu dengan pusat perbelanjaan seperti di Atrium, E Plaza, dan Admiral, sedangkan pada bioskop tradisional lainnya harga bisa Rp. 1500- Rp 2500 untuk bioskop kelas dua seperti di bioskop Indra, sedangkan pada kelas satu yang tidak menyatu pada pusat perbelanjaan harga karcisnya Rp. 2500-7500. Awal tahun 90-an di Gris mematok harga Rp 5000 (Wawancara dengan Yayuk, 12 April 2025). Padahal pada tahun 70-an harga karcis masih bernilai Rp. 275-350 untuk bioskop kelas dua seperti bioskop Rahayu, pada tahun 80-an di bioskop Indra, Ria, dan Kanjengan mematok harga Rp. 250-1000. Di tahun 90-an tarif bioskop Kanjengan paling murahnya Rp 2000, tetapi harga normalnya Rp. 5000-7000. Lonjakan harga karcis ini yang membuat penonton film lebih memilih membeli VCD atau meminjam VCD yang jauh lebih murah harganya. Apabila mau gratis, harus sabar menunggu tayang di televisi.

3. Fasilitas Bioskop yang Kurang Memadai

Bioskop-bioskop tradisional pada tahun 90-an banyak yang bisa dibilang tidak layak karena tidak direnovasi ataupun tidak ditingkatkan fasilitasnya. Contohnya seperti bioskop Indra yang hanya berkursi kayu dan banyak kutu kasur menyebabkan penonton film di bioskop gatal-gatal dan bentol-bentol kemerahan. Belum lagi dengan kebersihan yang tidak dijaga seperti bau pesing dan banyaknya tikus yang berkeliaran sepanjang film diputar. Fasilitas seperti ini dirasa cukup layak karena bioskop Indra termasuk bioskop dengan biaya masuk termurah di Semarang saat itu (Wawancara dengan Jhohanes Chistiono, 28 Februari 2025).

Di bioskop Kanjengan juga hampir sama dengan bioskop Indra, penonton bisa membuang air kecil sembarangan dan menyebabkan bau tidak sedap di bioskop. Bioskop Kanjengan bahkan menjadi tempat gelandangan untuk tidur dan terkesan horor. Belum lagi bau-bau asap rokok di dalam gedung bioskop yang menyebabkan terbatuk-batuk saat menikmati film (Wawancara dengan Tarcisius, 12 April 2025). Bioskop Ria tidak jauh beda keadaannya, namun kursi pada bioskop ini dapat dipindah-pindah. Pada Bioskop Gris juga banyak kursi yang sudah rusak dan keadaan di dalam gedungnya pengap.

Tidak hanya bioskop menengah kebawah saja yang diserang tikus, bioskop elite seperti Plaza, Gajahmada, dan Semarang juga banyak dijumpai tikus dengan jumlah yang cukup banyak. Penonton banyak yang berjingkat di tempat duduk karena adanya tikus di kaki, tikus-tikus ini juga sering menggeret makanan yang dibawa oleh penonton (Suara Merdeka, 22 Agustus 1989). Adanya tikus menjadi masalah yang sering dijumpai pada bioskop-bioskop di kota Semarang karena kurang terjaga kebersihannya dan cleaning servis hanya sekedar membersihkan tidak secara detail melihat masuknya tikus. Kursi bioskop juga banyak yang lapuk dimakan rayap karena terlalu pengap dan tidak ada sinar matahari yang masuk.

4. Adanya Hiburan Lain yang Jauh Lebih Murah

Stasiun televisi hadir di Indonesia pada tahun 1962, saat itu hanya ada TVRI yang dimiliki oleh pemerintah. Pemilik televisi di tahun tersebut juga masih sedikit, hanya di Jakarta saja saat itu. Namun pada tahun 1989 muncul stasiun televisi swasta, yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Setahun setelahnya muncul Surabaya Central Televisi (SCTV). Tahun 90-an muncul stasiun televisi lain secara bertahap seperti TPI tahun 1991, ANTV tahun 1993, dan Indosiar tahun 1994. Stasiun televisi swasta ini banyak menayangkan acara dari luar negeri seperti telenovela dan banyak memproduksi sinetron (Siregar, 2007). Produser dan sutradara film Indonesia banyak yang beralih ke industri sinetron karena lebih menguntungkan. Bahkan ada yang menjadi raja industri serial televisi, seperti Raam Punjabi (Nugroho & Herlina, 2015). Tayangan ini membuat masyarakat menjadi lebih suka menonton sinetron daripada film di bioskop karena tidak keluar uang untuk membayar karcis dan transportasinya.

Bahkan tahun 1986, pemerintah mengizinkan menggunakan antena parabola, jumlahnya peminatnya semakin meningkat tajam dibandingkan negara Asia lain. Tahun 1999 diperkirakan ada 25.000 antena parabola yang terpasang. Penonton di Jawa dan Sumatera dapat mengakses 6-20 siaran luar negeri pada saat itu (Nugroho & Herlina, 2015). Pada tahun 1999 sendiri, Indonesia tercatat memiliki 23 juta rumah tangga yang mempunyai televisi (Ibrahim, 2007). Menjamurnya televisi ini membuat rumah produksi film berpindah menjadi produksi sinetron yang dianggap lebih menguntungkan. Adanya televisi juga membuat film-film nasional maupun internasional pindah ke televisi. Banyak penonton di bioskop lebih memilih menunggu film ditayangkan ke televisi karena gratis. Industri film dan bioskop menjadi kehilangan sekitar 89 juta penonton yang membeli karcis akibat adanya televisi. Hal ini menjadikan salah satu faktor menurunnya produksi film nasional yang berakibat pada sepi penonton di bioskop (Rivers et al., 2003).

5. Bersaing Dengan Sinepleks

Sinepleks memonopoli bisnis film Indonesia dengan menghadirkan bioskop kelas elit yang menyatu dengan pusat perbelanjaan, pasalnya era tahun 80-an akhir bisnis bioskop sudah mulai menurun, lalu tercetuslah bisnis bioskop sineplex untuk menarik para penontonnya kembali (Jauhari, 1992). Film yang ditayangkan oleh bioskop sinepleks ini didominasi film impor, apabila bioskop menengah kebawah yang ingin membeli film impor tidak bisa karena hak edar film dikuasai sineplex, jikapun bisa dibeli hak edarnya biaya yang dikeluarkan cukup mahal (Prasisko, 2019). Bisnis sinepleks ini menjadikan film nasional menjadi tamu di rumahnya sendiri lantaran film impor lebih diutamakan. Penonton sudah enggan menonton film nasional pasalnya, karena dinilai membosankan dan alurnya mudah ditebak (Harian Ekonomi Neraca, 24 Juli 1992).

6. Kualitas Film Indonesia yang Dinilai Buruk

Konsumen penikmat film di kota Semarang mengalami peningkatan dalam memilih film, tahun 90-an banyak film nasional yang dinilai ketinggalan zaman dan monoton. Banyak penikmat film yang minatnya hanya terhadap film Hollywood, Sedangkan film Amerika tersebut biasa ditayangkan pada bioskop jaringan 21. Sedangkan film nasional ditayangkan pada bioskop kelas bawah. Jaringan 21 ini menguasai film asing terutama Hollywood, bahkan didukung oleh Amerika dengan ancaman boikot kayu dan tekstil dari Indonesia apabila ada batasan film impor (Kristanto, 2005). Iklan film yang tayang di bioskop sudah dipenuhi oleh film-film asing, pasalnya bioskop kelas menengah kebawah pada tahun 90-an sudah terus menerus merugi dan tidak berani mengiklankan film pada koran. Padahal pada tahun 80-an bioskop kelas B seperti Rahayu dan Indra masih mampu mengiklankan filmnya (Wawancara dengan Wahyono Gunung, 8 Maret 2025). Kualitas film nasional yang kurang ini membuat lesunya produksi film, bahkan menurunkan standar film dengan membuat film yang berunsur pornografi untuk menarik penonton. Film-film ini cukup marak diproduksi pada tahun 1993-1997. Dari film yang berbau unsur pornografi ini, membuat masyarakat merasa malu apabila menonton film di bioskop (Wawancara dengan Moch. Ubab, 16 Mei 2025).

Matinya Bioskop-Bioskop di Kota Semarang

Bioskop Kencana sudah tutup pada awal bulan November 1983 karena mengalami kerugian, tempat hiburan ini setiap hari harinya hanya mampu mendapatkan 200 pengunjung dalam tiga sampai empat kali pemutaran film, padahal kapasitasnya 1100 kursi. Harga tiketnya 250 perak saat itu. Jadi kalau ditotal setiap harinya hanya dapat mengumpulkan Rp 50.000- Rp 75.000 saja (Suara Merdeka, 22 November 1983). Sedangkan setahun setelahnya penonton bioskop di Jawa Tengah turun 20 % akibat banyaknya kaset video bajakan, terlebih kaset bajakan ini masih dalam keadaan utuh belum dipotong adegan yang kurang layak. Hal ini tentunya menjadikan video bajakan lebih menarik daripada menonton film yang sekali lihat dan banyak potongan adegannya (Suara Merdeka, 1984).

Dari penurunan penonton film di bioskop tahun 1984, direktur PT Perfini Jawa Tengah berencana menurunkan harga masuk bioskop di kota Semarang. Harga tanda masuk yang sebelumnya dinilai mahal oleh masyarakat dan berimbas penurunan jumlah penonton yang berakibat minimnya pendapatan dari bioskop.

Dengan diturunkannya harga masuk bioskop ini diharapkan dapat menarik para penonton film yang sudah banyak pindah ke video bajakan (Suara Merdeka, 1984). Tahun 1990, tercatat ada tujuh bioskop di kota Semarang yang telah gulung tikar. Ketujuh bioskop yang tutup ini adalah layar perak dengan ekonomi lemah dan menengah seperti Bioskop Siliwangi, Peterongan, Rajawali, Merdeka, Kencana, Sri, dan Rahayu (Suara Merdeka, 1990).

Tahun 1993 bioskop GRIS (Gedung Rakyat Indonesia Semarang) yang sekarang menjadi mall Paragon di jalan Pemuda tutup karena terus merugi dan tidak sanggup membayar sewa bangunan. Hal ini akibat dari yayasan Gedung Rakyat yang menghendaki sistem sewa dengan perhitungan permeter persegi Rp 2500. Pendapatan setiap harinya juga terbilang kecil, karena hanya mampu menarik 50-70 orang saja. Padahal bioskop ini mampu menampung 600 orang penonton (Suara Merdeka, 1993). Dua tahun setelahnya bioskop Gelora dan Indra ditutup pada awal tahun karena sepi penonton. Biasanya bioskop ramai pada malam minggu dan hari libur saja, selebihnya sepi penonton. Setelahnya di tahun yang sama bioskop Murni yang tutup (Suara Merdeka, 1995). Tahun 1996 bioskop Tugu Indah tidak beroperasi lagi karena terus merugi setiap harinya, bioskop ini memutar tiga kali putaran film setiap harinya, namun hanya dapat penonton tidak lebih dari 100 orang dengan harga karcis seribu rupiah untuk satu orang. Setiap bulannya hanya dapat meraup pendapatan kotor tiga juta, belum dipotong pajak hiburan 24 %, gaji karyawan yang berjumlah 12 orang dan biaya sewa film 40% (Suara Merdeka, 1996). Setahun setelahnya bioskop Gajahmada tutup, di tahun tersebut bioskop ini menjadi bioskop berlayar tunggal yang masih bertahan, lainnya gulung tikar akibat sepi penonton. Bioskop Gajahmada ini tutup sementara karena mau direnovasi menjadi E Plaza yang buka pada tahun 2006 (Suara Merdeka, 1996).

Kesimpulan

Meredupnya eksistensi bioskop karena banyak hal seperti adanya hiburan lain yang lebih mudah diakses, persaingan dengan televisi yang banyak melahirkan sinetron ataupun menayangkan film, persaingan dengan jaringan 21, majunya teknologi dengan adanya VCD, pajak hiburan yang mahal, kualitas film nasional yang dianggap buruk, fasilitas bioskop yang dinilai kurang, dan harga tiket bioskop yang cukup mahal. Puncak dari meredupnya bioskop di kota Semarang terjadi pada tahun 1996, dimana banyaknya bioskop tradisional gulung tikar hanya menyisakan bioskop-bioskop modern yang biasanya menyatu dengan pusat perbelanjaan dan berafiliasi dengan sinepleks. Bioskop yang menyisakan hiburan orang elite ini membuat masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah enggan menonton bioskop karena sayang dengan uangnya. Padahal yang meramaikan bioskop adalah mereka masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. Terjadinya krisis moneter juga membuat masyarakat enggan untuk menonton bioskop karena keadaan ekonomi sedang sulit.

Referensi

- Aditama, M. R. (2022). Bioskop dan Masyarakat Kota Palu, 1950-1998. *Manaqib*, 1(1), 57-75. <https://doi.org/10.24239/manaqib.v1i1.1199>.
- Ardan, S. (1992). *Dari Gambar Idoep ke Sinepleks*. GPBSI.

- Arief, C. (2019). Matinya Bioskop Lokal: Studi Kasus Bioskop Permata, Yogyakarta 1970-1990. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 8(2), 125-144. <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/3186>.
- Bernas. (1992). *Alternatif Lain, Pindah Lokasi*. (04 Juli 1992). Bernas.
- Biran, M. Y. (2009). *Sejarah Film 1900-1950 'Bikin Film di Jawa.'* Komunitas Bambu.
- Biro Pusat Statistik Jawa Tengah Tahun 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
- Cobban, J. L. (1974). Uncontrolled urban settlement: the kampong question in Semarang (1905—1940). *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, 130(4), 403-427. <http://www.jstor.org/stable/27861425>.
- Erwantoro, H. (2014). Bioskop Keliling Peranannya Dalam Memasyarakatkan Film Nasional dari Masa Ke Masa. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(2), 285-300.
- Fitriani, A. D. (2017). *Perkembangan Bioskop Kota Semarang Tahun 1980-1998*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Harian Ekonomi Neraca. (1992). *Iyut Bing Slamet Prihatin*. (24 Juli 1992). Harian Ekonomi Neraca.
- Ibrahim, I. S. (2007). *Televisi Sedang Menonton Anda: Kritik Etika dan Estetika Komoditi di Balik Budaya Televisi*. Jalasutra.
- Jauhari, H. (1992). *Layar Perak: 90 Tahun Bioskop Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmadi, H., & Wiyono. (1985). *Sejarah Sosial Kota Semarang 1900-1950*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kerins, M. (2011). *Beyond Dolby (Stereo) Cinema in The Digital Sound Age*. Indiana University Press.
- Kristanto, J. (2005a). *Katalog Film Indonesia 1926-2005*. Nalar.
- Kristanto, J. (2005b). *Sepuluh Tahun Terakhir Perfilman Indonesia*. Kompas.
- Kurnia, N., Irawanto, B., & Rahayu. (2004). *Menguak Peta Perfilman Indonesia*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI.
- Leertouwer, w. (1941). *Semarang Als Industrieel, Commercieel en Cultureel Centrum*. Administratiekantoor A. C. Van Pernis.
- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa Jilid 1: Batas-Batas Pembaratan*. Gramedia.
- Nugroho, G., & Herlina, S. (2015). *Krisis dan Paradoks Film Indonesia*. PT Kompas Media Nusantara.
- Nuqul, F. (2005). Pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia: Studi terhadap perilaku penonton bioskop. *Psikoislamika*, 2(2), 20-34.
- Nurudin. (2009). *Pengantar Komunikasi Massa*. Raja Grafindo Persada.
- Panuju, R. (2021). *Film dan Komunikasi Massa*. Intrins Publishing.

- Pos Sumatera. (1910). *J. Hallermann*, (8 Januari 1910). Pos Sumatera
- Rambey, M. (2024). Negosiasi Terhadap Ketiadaan Bioskop di Banda Aceh Selama Dua Dekade. *Urban: Jurnal Seni Urban dan Industri Budaya*, 8(1), 5–16. <https://jurnalurban.pascasarjanaikj.ac.id/index.php/urban/article/view/111>.
- Reiner, G. J. (1997). *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Pustaka Pelajar.
- Rivers, W. L., Munandar, H., & Priatna, D. (2003). *Media Massa dan masyarakat Modern*. Pranada Media.
- Sadilah, E., Herawati, I., & Sukari. (2011). *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Saivana, R., Umar, M., & Abidin, Z. (2016). Perkembangan Bioskop di Kota Banda Aceh 1930-2004. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1(1).
- Siregar, A. E. (2007). *Ekonomi Politik Media, Audiens, dan Ketimpangan Informasi*. Informedia.
- Suara Merdeka. (1983). *Bioskop Kencana Kaligawe Akan Tutup, Diduga Rugi*. (22 November 1983). Suara Merdeka.
- Suara Merdeka. (1984). *Harga Tanda Masuk Bioskop Semarang Akan Diturunkan*. (27 Juni 1984). Suara Merdeka.
- Suara Merdeka. (1984). *Penonton Bioskop di Jateng Turun 20 Persen Akibat Vidio*. (04 Juni 1984). Suara Merdeka.
- Suara Merdeka. (1985). *5 dari 24 Buah Gedung Bioskop Tak Pernah Putar Film Nasional*. (12 Oktober 1985). Suara Merdeka.
- Suara Merdeka. (1989). *Jumlah Penonton Bioskop Turun Akibat Kaset-Kaset Vidio Gelap*. (09 Januari 1989). Suara Merdeka.
- Suara Merdeka. (1990). *Tujuh Gedung Bioskop di Semarang Gulung Tikar*. (10 Desember 1990). Suara Merdeka.
- Suara Merdeka. (1993). *Penutupan Bioskop GRIS Akibat Sering Merugi*. (28 Desember 1993). Suara Merdeka.
- Suara Merdeka. (1995). *Bioskop Gelora dan Indra Ditutup*. (07 Januari 1995). Suara Merdeka.
- Suara Merdeka. (1996). *Banyak Bioskop Gulung Tikar Karena Kurang Antisipasi*. (31 Desember 1996). Suara Merdeka.
- Suara Merdeka. (1996). *Bioskop Tugu Indah "Dipusokan"*. (13 April 1996). Suara Merdeka.
- Suara Merdeka. (1996). *Giliran Bioskop Tugu Indah*. (12 April 1996). Suara Merdeka.
- Suara Merdeka. (1997). *Bioskop Gajahmada Gulung Layar Sementara*. (11 Juni 1997). Suara Merdeka.
- Suara Merdeka. (1998). *Iklan Film di Bioskop Semarang*. (03 Agustus 1998). Suara Merdeka.

- Sunardi, A., Afiah, W. A., Fadlah, S. N., & Ribawati, E. (2024). Krisis Moneter 1997-1998: Akar Penyebab, Dampak Ekonomi, dan Kebijakan Penanganan di Indonesia. *Sindoro: Cendekia Pendidikan*, 5(6), 21-30.
- Suwitri, S. (2010). Semarang Venesia dari Timur Hingga Semarang Pesona Asia: Perubahan Kebijakan Pembangunan Kota Semarang. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 8(1), 112-124. <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/997>.
- Tio, J. (2002). *Kota Semarang Dalem Kenangan*. Sinar Indonesia.
- Tjasmadi, J. (2008). *100 Tahun Sejarah Bioskop di Indonesia (1900-2000)*. PT Megindo Tunggal Sejahtera.
- Wawancara Pribadi dengan Johannes Chistion, 27 Februari 2025
- Wawancara Pribadi dengan Moch Ubab, 16 Mei 2025.
- Wawancara Pribadi dengan Muhammad Ali Ridho, 3 Mei 2025.
- Wawancara Pribadi dengan Tarcisius Sudarisman, 12 April 2025.
- Wawancara Pribadi dengan Wahyono Gunung Mahessa, 8 Maret 2025.
- Wawancara Pribadi dengan Yayuk Sri Rahayu, 12 April 2025.
- Yuliati, D., & Susilowati, E. (2023). The Outstanding Value of a Cultural Heritage: The Old City of Semarang as the Center for Global Trade in Java, Indonesia in the 18th–20th Centuries. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 448, p. 01018). EDP Sciences.
- Yuliati, D., Surojo, D., & Hayati, C. (1997). Industrialisasi di Semarang 1906-1930. *Universitas Diponegoro*.
- Yuliati, D., Susilowati, E., & Suliyati, T. (2020). *Riwayat Kota Lama Semarang dan Keunggulannya sebagai Warisan Dunia*. Sinar Hidoep.